

Muhammadiyah Berkemajuan dan Transformasi Pendidikan Madrasah: Perspektif Najib Burhani dalam Kerangka Kebijakan Publik Pendidikan Islam

Taslim Perdana¹; Ahmad Lahmi²; Dasrizal Dahlan³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: taslimperdana@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep Muhammadiyah Berkemajuan dalam perspektif Najib Burhani dan relevansinya bagi transformasi pendidikan madrasah dalam kerangka kebijakan publik pendidikan Islam. Dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis reflektif-praksis, artikel ini menempatkan gagasan berkemajuan sebagai paradigma keilmuan dan kebijakan yang menuntut keterbukaan berpikir, kritik internal, serta orientasi pada kemaslahatan publik. Sebagai pejabat pendidikan madrasah, penulis memaknai pemikiran Najib Burhani tidak hanya sebagai wacana akademik, tetapi juga sebagai landasan etik dan operasional dalam perumusan kebijakan, tata kelola lembaga, dan pengembangan mutu pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Muhammadiyah Berkemajuan relevan untuk mendorong madrasah yang unggul secara akademik, moderat dalam keberagamaan, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.

Kata Kunci: Muhammadiyah Berkemajuan, Najib Burhani, Pendidikan Madrasah, Kebijakan Publik, Pendidikan Islam

Abstract: This paper examines the concept of Progressive Muhammadiyah from the perspective of Najib Burhani and its relevance to the transformation of madrasah education within the framework of Islamic education public policy. Employing a literature review and a reflective-praxis analysis approach, the article positions the idea of progressiveness as a scholarly and policy paradigm that calls for openness of thought, internal critique, and an orientation toward the public good. As a madrasah education official, the author interprets Najib Burhani's ideas not merely as academic discourse, but also as an ethical and operational foundation for policy formulation, institutional governance, and the enhancement of educational quality. The findings indicate that Progressive Muhammadiyah is relevant in promoting madrasahs that are academically excellent, religiously moderate, and adaptive to the dynamics of national policy.

Keyword: Progressive Muhammadiyah, Najib Burhani, Madrasah Education, Public Policy, Islamic Education

ARTICLE HISTORY

Received: 26 Desember 2025

Revised: 28 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Keyword:
Muhammadiyah
Berkemajuan, Najib
Burhani, Pendidikan
Madrasah, Kebijakan
Publik, Pendidikan Islam

Copyright © 2025 by
Authors, Published by
Risalah: Midaduna:
Journal of Islamic
Studies. This is an
open access article under
the CC BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Pendahuluan

Muhammadiyah sejak awal kelahirannya pada tahun 1912 diposisikan sebagai gerakan Islam modern yang mengusung semangat tajdid (pembaruan), rasionalitas, dan keterlibatan aktif dalam transformasi sosial (Nashir, 2010; Maarif, 2015). Gerakan ini lahir sebagai respons terhadap stagnasi pemikiran keagamaan, praktik keislaman yang tidak selaras dengan ajaran normatif Islam, serta ketertinggalan umat Islam dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Azra, 2012; Nakamura, 2012). Dengan menempatkan Islam sebagai agama yang kompatibel dengan ilmu pengetahuan dan modernitas, Muhammadiyah mengembangkan corak keberagamaan yang berorientasi pada praksis sosial, kemanusiaan, dan pencerahan (tanwir) (Kuntowijoyo, 2006).

Peran strategis Muhammadiyah dalam pembangunan sistem pendidikan modern di Indonesia tercermin dari kontribusinya melalui pendirian sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum (Muhaimin, 2012; Nata, 2014). Amal usaha pendidikan Muhammadiyah tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga membentuk paradigma pendidikan Islam yang progresif, rasional, dan berorientasi pada mutu (Federspiel, 2000; Hefner, 2011). Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat dipandang sebagai aktor masyarakat sipil yang memiliki posisi strategis dalam diskursus kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan Islam di Indonesia (Tilaar, 2012; Sirozi, 2018).

Namun demikian, dinamika sosial-politik, percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan kebijakan pendidikan nasional menghadirkan tantangan baru bagi keberlanjutan peran Muhammadiyah di bidang pendidikan (Zamroni, 2013). Kebijakan negara terkait standar nasional pendidikan, penguatan moderasi beragama, transformasi digital, dan tata kelola kelembagaan menuntut reinterpretasi terhadap konsep berkemajuan yang selama ini menjadi identitas ideologis Muhammadiyah (Kementerian Agama RI, 2020; Suyatno, 2020). Dalam konteks ini, berkemajuan tidak cukup dimaknai sebagai keberhasilan institusional atau pertumbuhan kuantitatif amal usaha, tetapi harus dipahami sebagai kemampuan reflektif dan kritis dalam merespons perubahan sosial dan kebijakan publik (Rahman, 1982).

Najib Burhani menawarkan perspektif kritis yang menempatkan Muhammadiyah Berkemajuan sebagai proyek intelektual dan kultural yang berkelanjutan (Burhani, 2016). Menurut Burhani (2019), keberlanjutan gerakan Muhammadiyah sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memproduksi gagasan, membangun tradisi keilmuan, serta membuka ruang kritik internal secara sehat. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak boleh terjebak dalam rutinitas kelembagaan, tetapi harus terus terlibat secara aktif dalam ruang publik sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosialnya (Burhani, 2020).

Perspektif Najib Burhani tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan pendidikan madrasah yang berada pada persimpangan antara tuntutan mutu akademik, penguatan moderasi beragama, dan penyesuaian terhadap kebijakan publik pendidikan Islam (Mahfud, 2019; Sirozi, 2018). Madrasah tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter keislaman yang inklusif, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Azra, 2012; Suyatno, 2020). Dalam

konteks ini, Muhammadiyah Berkemajuan dapat diposisikan sebagai paradigma etik dan kebijakan yang mendorong madrasah menjadi institusi pembelajaran yang kritis, adaptif, dan transformatif (Burhani, 2016).

Sebagai pejabat pendidikan madrasah, refleksi terhadap konsep Muhammadiyah Berkemajuan memiliki implikasi praktis terhadap perumusan kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan orientasi pembelajaran. Kebijakan pendidikan madrasah yang berlandaskan paradigma berkemajuan menuntut kepemimpinan visioner, pengambilan keputusan berbasis nilai, serta keberpihakan pada peningkatan mutu dan keadilan pendidikan (Tilaar, 2012; Nata, 2014). Dengan demikian, gagasan Najib Burhani tidak hanya relevan sebagai wacana akademik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kerangka etik dan operasional dalam pengelolaan pendidikan madrasah di tengah dinamika kebijakan nasional (Burhani, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan mengembangkan analisis konseptual mengenai Muhammadiyah Berkemajuan dalam perspektif Najib Burhani dan mengaitkannya secara sistematis dengan transformasi pendidikan madrasah dalam kerangka kebijakan publik pendidikan Islam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan wacana pendidikan Islam progresif, sekaligus kontribusi praktis bagi para pengambil kebijakan pendidikan madrasah dalam merumuskan strategi pengembangan lembaga yang unggul, moderat, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan menelaah karya-karya Najib Burhani, literatur tentang Muhammadiyah, serta dokumen kebijakan pendidikan Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan perspektif teori gerakan sosial, pendidikan Islam, dan kebijakan publik. Secara teoretis, Muhammadiyah dipahami sebagai *modernist Islamic movement* yang berupaya menjembatani nilai-nilai keislaman dengan rasionalitas modern. Sementara itu, pendidikan madrasah dianalisis sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kekhasan religius sekaligus tanggung jawab kebangsaan. Kerangka ini memungkinkan pembacaan yang komprehensif terhadap gagasan berkemajuan sebagai paradigma keilmuan dan kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kajian pustaka terhadap karya-karya Najib Burhani, literatur tentang Muhammadiyah, serta dokumen kebijakan pendidikan Islam, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan utama yang menggambarkan posisi dan relevansi konsep Muhammadiyah Berkemajuan dalam transformasi pendidikan madrasah. Hasil kajian ini bersifat konseptual-analitis dan menekankan pada pola gagasan, kecenderungan pemikiran, serta implikasi kebijakan yang dapat diidentifikasi secara sistematis.

Muhammadiyah Berkemajuan sebagai Kerangka Normatif dan Epistemik

Hasil kajian menunjukkan bahwa Muhammadiyah Berkemajuan dalam perspektif Najib Burhani tidak diposisikan sebagai slogan ideologis semata, melainkan sebagai kerangka normatif dan epistemik yang mengarahkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara

bertindak organisasi. Konsep berkemajuan menekankan pentingnya rasionalitas, keterbukaan terhadap kritik, serta orientasi pada kemaslahatan publik sebagai indikator utama kemajuan. Dengan demikian, kemajuan tidak diukur dari ekspansi kelembagaan atau simbol formal keagamaan, tetapi dari kualitas produksi gagasan, keberanian reflektif, dan relevansi sosial.

Dalam konteks pendidikan, kerangka ini menempatkan lembaga pendidikan, termasuk madrasah, sebagai ruang produksi pengetahuan dan pembentukan nalar kritis, bukan sekadar instrumen reproduksi doktrin atau kepatuhan administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep Muhammadiyah Berkemajuan memiliki daya jelajah epistemik yang relevan untuk dijadikan paradigma pengembangan pendidikan madrasah.

Posisi Pendidikan Madrasah dalam Perspektif Berkemajuan

Kajian ini menemukan bahwa pendidikan madrasah, dalam kerangka kebijakan publik pendidikan Islam, berada pada posisi strategis namun rentan terhadap pendekatan birokratis dan normatif semata. Madrasah diposisikan secara simultan sebagai institusi pendidikan keagamaan dan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Perspektif Muhammadiyah Berkemajuan memberikan dasar konseptual untuk menyeimbangkan dua posisi tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa madrasah berkemajuan ditandai oleh tiga karakter utama, yaitu: (1) orientasi pada mutu akademik yang terukur dan berkelanjutan, (2) penguatan moderasi beragama sebagai praktik sosial, bukan sekadar slogan kebijakan, dan (3) kemampuan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional tanpa kehilangan identitas keislamannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa paradigma berkemajuan dapat berfungsi sebagai jembatan antara tuntutan kebijakan negara dan nilai-nilai pendidikan Islam substantif.

Relevansi Kritik Internal dalam Tata Kelola Pendidikan Madrasah

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kritik internal merupakan elemen kunci dalam konsep Muhammadiyah Berkemajuan menurut Najib Burhani. Kritik internal dipahami sebagai mekanisme korektif untuk mencegah stagnasi kelembagaan dan rutinisasi birokrasi. Dalam konteks pendidikan madrasah, kritik internal relevan untuk membaca ulang praktik tata kelola yang cenderung administratif, hierarkis, dan kurang berbasis data.

Temuan ini memperlihatkan bahwa reformasi tata kelola madrasah yang berkemajuan menuntut pergeseran dari pendekatan kontrol menuju pendekatan pembinaan dan fasilitasi. Pengambilan kebijakan berbasis data mutu pendidikan, evaluasi program secara reflektif, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia muncul sebagai implikasi langsung dari prinsip kritik internal tersebut.

Keterkaitan Muhammadiyah Berkemajuan dengan Kebijakan Publik Pendidikan Islam

Kajian ini menemukan adanya kesesuaian konseptual antara gagasan Muhammadiyah Berkemajuan dan arah kebijakan publik pendidikan Islam di Indonesia,

hususnya terkait penguatan moderasi beragama, peningkatan mutu madrasah, dan pengakuan pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Muhammadiyah Berkemajuan diposisikan sebagai perspektif masyarakat sipil yang mendukung kebijakan berbasis pengetahuan, keadilan sosial, dan kepentingan publik.

Hasil ini menunjukkan bahwa konsep berkemajuan dapat memperkaya kerangka implementasi kebijakan pendidikan madrasah, terutama pada level pemerintah daerah dan provinsi, yang berperan sebagai penghubung antara regulasi nasional dan praktik satuan pendidikan. Dengan demikian, Muhammadiyah Berkemajuan tidak bertentangan dengan kebijakan negara, tetapi justru dapat berfungsi sebagai sumber nilai dan etika kebijakan.

Implikasi Operasional bagi Pengambil Kebijakan Pendidikan Madrasah

Secara operasional, hasil kajian ini menunjukkan bahwa perspektif Muhammadiyah Berkemajuan relevan bagi pejabat pendidikan madrasah dalam menjalankan peran strategisnya. Perspektif ini mendorong birokrasi pendidikan untuk tidak semata-mata berfungsi sebagai pengendali regulasi, tetapi sebagai aktor pembelajaran kebijakan (*policy learning actor*) yang adaptif dan reflektif.

Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan madrasah yang berkemajuan perlu memberi ruang inovasi pedagogik, memperkuat kepemimpinan akademik kepala madrasah, serta mengintegrasikan nilai keislaman substantif dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan madrasah dapat berkembang sebagai institusi yang unggul secara akademik, moderat secara keberagaman, dan relevan dengan tantangan kebijakan publik kontemporer.

Pembahasan

Muhammadiyah Berkemajuan sebagai Paradigma Keilmuan

Najib Burhani memaknai Muhammadiyah Berkemajuan sebagai paradigma keilmuan yang menempatkan rasionalitas, keterbukaan, dan etos kritik sebagai fondasi gerakan. Kemajuan tidak direduksi pada pertumbuhan fisik institusi, melainkan diukur dari kemampuan organisasi dalam memproduksi pengetahuan dan merespons perubahan sosial secara reflektif.

Dalam konteks pendidikan madrasah, paradigma ini menantang praktik pendidikan yang terlalu administratif dan berorientasi kepatuhan. Madrasah berkemajuan seharusnya menjadi ruang pembentukan nalar kritis, penguatan literasi keilmuan, serta integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Contohnya, pengembangan kurikulum madrasah perlu mendorong pembelajaran berbasis riset sederhana, diskusi tematik, dan pemecahan masalah sosial yang relevan dengan kehidupan peserta didik.

Relasi Agama, Kebangsaan, dan Kebijakan Pendidikan

Burhani menekankan pentingnya relasi konstruktif antara agama dan negara. Muhammadiyah Berkemajuan diposisikan sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mendukung kebijakan publik berbasis pengetahuan dan nilai keadilan sosial. Perspektif ini penting untuk menghindari politisasi agama yang dapat mereduksi fungsi pendidikan.

Dalam kebijakan pendidikan madrasah, pendekatan ini mendorong integrasi nilai keislaman dengan prinsip kebangsaan. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ajaran agama, tetapi juga sebagai wahana pembentukan warga negara yang moderat, toleran, dan berdaya saing. Implementasi kebijakan moderasi beragama, misalnya, dapat diwujudkan melalui penguatan materi akhlak sosial, dialog lintas budaya, dan praktik pembelajaran yang menghargai keberagaman.

Kritik Internal dan Reformasi Tata Kelola Pendidikan

Salah satu poin penting pemikiran Najib Burhani adalah urgensi kritik internal sebagai prasyarat kemajuan. Organisasi besar berisiko mengalami stagnasi jika terlalu fokus pada stabilitas struktural. Dalam pendidikan madrasah, hal ini tampak pada kecenderungan birokratisasi yang membatasi inovasi.

Dari perspektif kebijakan, Muhammadiyah Berkemajuan menuntut reformasi tata kelola madrasah yang adaptif dan berbasis data. Pengambilan keputusan perlu didukung oleh analisis kebutuhan riil satuan pendidikan, evaluasi berbasis bukti, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Contoh konkretnya adalah penggunaan data mutu pendidikan untuk merancang program pembinaan guru dan kepala madrasah secara lebih tepat sasaran.

Implikasi bagi Kebijakan Pendidikan Madrasah

Gagasan Muhammadiyah Berkemajuan memiliki implikasi strategis bagi kebijakan pendidikan madrasah, khususnya pada level pemerintah provinsi sebagai simpul koordinasi antara kebijakan nasional dan implementasi satuan pendidikan. Dalam konteks ini, madrasah tidak hanya dipahami sebagai objek regulasi, tetapi sebagai mitra strategis negara dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pertama, kebijakan pendidikan madrasah perlu diarahkan pada penguatan mutu akademik dan karakter secara seimbang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Perspektif Muhammadiyah Berkemajuan menegaskan bahwa pencapaian tujuan tersebut memerlukan kebijakan yang memberi ruang inovasi pedagogik dan penguatan budaya akademik di madrasah.

Kedua, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta regulasi turunannya yang mengakui keberadaan pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah dituntut untuk memperkuat identitas keislamannya tanpa kehilangan relevansi kebangsaan. Muhammadiyah Berkemajuan memberikan landasan normatif agar pendidikan madrasah tidak terjebak pada formalisme simbolik, melainkan menampilkan Islam yang substantif, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Ketiga, sebagai pejabat pendidikan madrasah di tingkat provinsi, perspektif berkemajuan mendorong pergeseran peran birokrasi dari sekadar pengendali administratif menuju fasilitator peningkatan mutu. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama tentang penguatan moderasi beragama dan peningkatan mutu madrasah melalui

pendekatan berbasis data, supervisi akademik, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan madrasah yang berkemajuan bukan hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong keberanian inovasi, kepemimpinan akademik, dan tanggung jawab moral dalam membangun pendidikan Islam yang unggul dan relevan dengan tantangan zaman.

Kesimpulan

Muhammadiyah Berkemajuan dalam perspektif Najib Burhani menawarkan kerangka konseptual yang mendalam bagi transformasi pendidikan madrasah dan perumusan kebijakan publik pendidikan Islam. Kemajuan dipahami sebagai proses intelektual dan sosial yang berkelanjutan, menuntut keterbukaan berpikir, kritik internal, dan komitmen terhadap nilai kemanusiaan serta kebangsaan.

Dalam konteks pendidikan madrasah, gagasan ini memperkuat urgensi menjadikan madrasah sebagai pusat pengembangan ilmu, karakter, dan moderasi beragama. Dengan merawat tradisi berpikir terbuka dan keberanian melakukan pembaruan, Muhammadiyah Berkemajuan dapat menjadi panduan praksis bagi pengelola dan pembuat kebijakan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Burhani, A. N. (2016). *Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran Dari Puritanisme Ke Kosmopolitanisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Burhani, A. N. (2019). *Islam, Muhammadiyah, dan Politik Kebangsaan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Burhani, A. N. (2020). The Muhammadiyah's moderation stance in contemporary Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 14(1), 1–28. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.1-28>
- Burhani, N. (2019). *Islam dan Pluralisme di Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Burhani, N. (2020). *Muhammadiyah Berkemajuan: Dinamika Pemikiran dan Praksis Sosial*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Burhani, N. (2021). Islam, kebangsaan, dan ruang publik di Indonesia. *Studia Islamika*, 28(2), 245–268.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Federspiel, H. M. (2000). *Islam And Ideology In The Emerging Indonesian State*. Leiden: Brill.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Roadmap Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maarif, A. S. (2015). *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan.
- Mahfud, C. (2019). *Pendidikan Islam dan Kebijakan Publik*. Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 245–260. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.245-260>
- Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nakamura, M. (2012). *The Crescent Arises Over The Banyan Tree*. Singapore: ISEAS.
- Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nata, A. (2014). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, F. (1982). *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sirozi, M. (2018). Islamic education policy in Indonesia. *Al-Jami'ah*, 56(2), 345–370. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.345-370>
- Suyatno. (2020). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.171.1-14>
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zamroni. (2013). *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak.